

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung)

by Lilis Puspitawati (2021)

Submission date: 14-Jul-2023 01:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2130937789

File name: AGREGASI._SINTA_3MEI_2021_.pdf (1.03M)

Word count: 5334

Character count: 35459

²
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS KEUANGAN
(Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung)**

Lilis Puspitawati ¹, Mega Marisa Effendy ²
^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Komputer Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: lilis.puspitawati@email.unikom.ac.id¹,
mega.mariss@email.com²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang ¹mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Penelitian ini diawali adanya suatu permasalahan kualitas laporan keuangan yang rendah, pengendalian intern yang kurang memadai serta rendahnya akuntabilitas keuangan pada berbagai instansi pemerintah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bandung dengan unit analisis unit keuangan dan unit pengawasan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 responden yang dipilih berdasarkan teknik simple random sampling. Pengujian statistik menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square (PLS) 3.0. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan kualitas penyajian laporan dan ¹efektifitas pengendalian internal merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Keuangan

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL ACCOUNTABILITY
(Survey at Bandung City Local Government Work Units/SKPD)**

¹
Abstract

This study aims to determine the effect of internal control, the quality of financial reports on financial accountability based on the existence of a problem with low financial report quality, inadequate internal control and low financial accountability in various government agencies in the city of Bandung. This research uses descriptive and quantitative methods. The population in this study were 80 Regional Work Units (SKPD) in the city of Bandung with the financial and control unit observation units. The total sample in this study was 57 respondents selected based on simple random sampling technique. Statistical test using Structural Equation Modeling (SEM) through the Partial Least Square (PLS) 3.0 approach. The results showed that the quality of financial reports had a significant positive effect on financial accountability, and internal control had a positive effect on regional financial accountability.

Keywords: Quality of Financial Statements, Internal Control, Financial Accountability.

PENDAHULUAN

Maraknya kasus temuan BPK⁴ atas penyalahgunaan laporan keuangan yang berlanjut hingga saat ini berdampak pada tingginya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas keuangan pemerintah sehingga memicu diterbitkannya Inpres no 7 Tahun 1999, paket perundangan pengelolaan keuangan negara yaitu UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004 serta peraturan perundangan turunannya. Paket aturan tersebut terdiri dari aturan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan keuangan yang komprehensif yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap periode pelaporannya.

Diberlakukannya seperangkat kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran daerah dalam mengelola semua aspek keuangan daerah menciptakan citra pemerintahan yang bersih/*Good Governance* (Ririh dan Lilis, 2017). *Good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang terpadu dan akuntabel yang selaras dengan prinsip demokrasi, efisiensi pasar, penangkalan korupsi, berdasarkan pada anggaran dan penegakan kerangka hukum dan politik untuk menciptakan suasana kondusif yang menumbuhkan citra pengelolaan pemerintah yang baik dalam meningkatkan iklim usaha bagi pihak

swasta (Sumarto Hetifa Sj, 2003:1). *Good governance* dapat dikatakan pula sebagai seperangkat sistem dari suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan public. Menurut Ihyaul Ulum (2010:31), *Good Governance* ditopang oleh tiga pilar utama yaitu prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip utama tersebut, seharusnya menjadi landasan operasional yang ideal bagi para pejabat public untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih di berbagai daerah Indonesia.

Namun faktanya prinsip tersebut masih belum sepenuhnya dapat dipraktikkan dengan baik, karena sampai saat ini masih terdapat temuan BPK terhadap laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun Daerah. Menurut Ketua BPK RI Firman Agung Sampurna: hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat 7.868 temuan dari 13.567 permasalahan, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,97 triliun," (https://news.ddtc.co.id/laporan-hasil-audit-semester-i-2020-akhirnya-terbit-ini-temuan-bpk-25425?page_y=785). Fakta-fakta tersebut menunjukkan pemerintah pusat maupun daerah belum mampu melaksanakan prinsip Akuntabilitas keuangan dengan baik.

Akuntabilitas merupakan istilah lain dari pertanggungjawaban (Indra

Bastian, 2010: 385) atau dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi pada entitas lain yang berhak dan berkewenangan meminta pertanggungjawaban (Abdul Halim, 2012:20). Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas berbagai pelaksanaan tugas atau misi sebuah organisasi atau unit instansi kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya Ihyaul Ulum (2010:31) menyatakan Akuntabilitas keuangan merupakan melaporkan aktivitas laporan keuangan pemerintah mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban atas penguasaan dan penggunaan dana-dana yang

dipercayakan untuk dikelola pada pihak tertentu.

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan praktik good governance. Ihyaul Ulum (2010:41) berpendapat bahwa akuntabilitas keuangan harus ditopang oleh tiga komponen utama diantaranya integritas keuangan, pengungkapan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun faktanya, akuntabilitas keuangan belum dipraktikan secara optimal, seperti yang diungkapkan oleh Hadi selaku Sekjen Kemendagri bahwa belum efektif dan efisiennya anggaran keuangam terjadi karena para pejabat pengelola keuangan belum memiliki integritas keuangan yang baik, sehingga anggaran yang diusulkan masih syarat dengan kepentingan individu (Media Indonesia 2017). Selanjutnya terkait dengan masalah pengungkapan, bahwa pemanfaatan Asset beberapa Pemda belum sepenuhnya diungkapkan penggunaannya dalam catatan laporan keuangan (LHP LKPD Kota Bandung, 2017). Ketiga terkait masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti dikemukaakn oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa adanya dugaan *mark-up* harga tanah dalam proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa titik Kota Bandung kurang mengikuti

peraturan yang berlaku sehingga dokumen yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menyebabkan kerugian mencapai 25 miliar hingga tahun 2018. (Nur Indah Fatmawati, DetikNews, 2018). Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan baik pemerintah pusat maupun daerah belum sepenuhnya mampu mempraktikkan prinsip akuntabilitas keuangan dengan baik.

Akuntabilitas Keuangan dapat terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat pengendalian internal yang memadai. Efektif tidaknya pengendalian internal yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan dalam suatu instansi pemerintah (Mahmudi, 2010:27).

Pengendalian internal merupakan paket kebijakan yang ditujukan untuk melindungi asset perusahaan, menjamin keakuratan informasi akuntansi, serta memastikan semua ketentuan hukum dan kebijakan manajemen telah dijalankan oleh seluruh individu dalam organisasi (Hery, 2016:159). Selanjutnya menurut Romney & Steinbart (2015:216) pengendalian internal adalah proses yang bertujuan untuk jaminan memadai dalam mencapai tujuan strategis pada suatu organisasi yaitu menjaga asset perusahaan, menjamin relevansi dan keakuratan pelaporan

keuangan untuk dihasilkannya informasi akuntansi yang handal, mendorong efisiensi operasional serta ditaatinya ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada berbagai pernyataan tersebut maka dapat dikatakan **pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh pihak yang independent dalam organisasi** yang berperan dalam menjamin laporan keuangan disajikan sesuai standar yang relevan, Asset Organisasi terjaga dengan baik, serta efisiensi dan efektifitas prosedur suatu organisasi.

Pengendalian internal memiliki komponen-komponen: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penaksiran Resiko, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi serta 5. Pemantauan. kelima unsur tersebut harus saling bersinergi untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif dalam suatu organisasi (Hery, 2016:93).

Dalam praktiknya saat ini pengendalian internal masih belum dapat implementasikan dengan baik karena masih sering dijumpai permasalahan, seperti adanya lingkungan pengendalian yang tidak teridentifikasi yang belum memadai yang terjadi pada pemerintah daerah dan pusat (Ketua BPK, Arman Syifa: 2017), Kemudian kurangnya kemampuan pemerintah dalam menilai resiko manajemen asset sehingga menyebabkan kerugian senilai 72,8

miliar akibat keberadaan asset yang tidak jelas. (BPK, 2018). Selanjutnya, diketahui bahwa belum adanya informasi dan komunikasi tim yang baik. (BPK, 2018). masalah aktivitas pengendalian yang belum memadai di pemerintahan Kota Bandung sehingga masih terdapat pencatatan yang tidak akurat karena belum menghasilkan formulir-formulir maupun laporan yang sesuai. Terakhir, pada unsur pemantauan. Pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam menindaklanjuti setiap temuan atau reviu yang diberikan oleh BPK yang ditandai dengan dijumpainya kesalahan yang sama dalam pengelolaan pengamana fisik dibidang aset. (LHP LKPD, IHPS 1 Tahun 2018).

Inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan masih dijumpai hingga saat ini, sehingga menimbulkan ketertarikan peneliti untuk meneliti kembali variabel tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dolly Ramon pada 64 responden Inspektorat Kota Sumatera Barat di tahun 2014 memberikan bukti empiris bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akutabilitas keuangan.

Selanjutnya, hasil riset Heppy dan Andy di tahun 2017 pada 106 pemerintah daerah di pulau Jawa berhasil membuktikan faktor Pengendalian Internal terbukti

berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas laporan keuangan, adapun dua variabel lainnya yaitu Desentraliasasi Fiscal dan Kinerja pemerintah tidak terbukti berpengaruh terhadap Akuntabilitas laporan keuangan. Dalam penelitian tersebut pengaruh di uji dengan menggunakan regresi linear berganda.

Penelitian Rahima Purba pada tahun 2017, menguji pengaruh variabel sistem akuntansi daerah, Transparansi Publik dan Pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada entitas Badan keuangan Daerah Tanah datar di sumatera utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda bahwa ketiga variabel yang diteliti tidak terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Selanjutnya, Penelitian Karyadi (2019) pada 216 Perangkat Desa kecamatan Aikmel dan Lenek ⁸ memberikan bukti empiris bahwa Pengendalian internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan kompetensi sumber Daya manusia secara parsial terbukti berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan (Mardasmo, 2016:3). Demikian pula M. Mahsun, dkk (2016:115) berpendapat,

kualitas penyajian laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban entitas pengelola keuangan dan menjadi salah satu faktor dalam menciptakan akuntabilitas keuangan.

Laporan keuangan merupakan output dari siklus akuntansi, yang disajikan dalam bentuk informasi keuangan entitas pada periode akuntansi, yang berfungsi untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi kualitas laporan keuangan adalah relevansi, kehandalan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan. (V. Wiratmaja Sujarweni, 2017:2-3). Laporan keuangan menghasilkan informasi keuangan yang digunakan pihak manajemen dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kinerja keuangan entitas tersebut (Ihya Ulum, 2011:4).

Penyajian laporan keuangan harus melalui prosedur yang baik, agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang akan digunakan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan strategis (Deddi Nordiawan, 2010:44). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan proses pengolahan transaksi keuangan yang berbentuk ringkasan informasi keuangan perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran normatif untuk

pengambilan keputusan pihak internal maupun eksternal (M. Mahsun, 2016: 112).

Agar dapat dikategorikan berkualitas, Laporan Keuangan tentunya harus memiliki ciri kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:2-3) harus mengandung unsur (1) relevan yaitu mewakili/sesuai kondisi yang terjadi, (2) Handal mengandung arti dapat dibuktikan berdasarkan data keuangan yang akurat, (3) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain karena dibuat berdasarkan standar, serta (4) dapat dipahami karena dibuat dalam format yang seragam dan mudah dipahami.

Kondisi saat ini, Laporan keuangan daerah masih memiliki permasalahan diantaranya, masih belum bisa dikatakan relevan dikarenakan informasi mengenai aset yang disajikan tidak lengkap (BPK, 2018). Lalu, belum bisa dikatakan andal karena Ketua BPK mengungkapkan bahwa Kota Bandung belum bisa memberikan dokumen-dokumen penunjang laporan keuangan untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan data-data yang disajikan dalam laporan keuangan. (BPK, 2018).

Masalah yang lainnya adalah Laporan keuangan Kota Bandung belum bisa dibandingkan karena selama lima periode akuntansi (2013-2017) menggunakan standar akuntansi yang

berbeda, dimulai dari standar akuntansi berbasis kas menuju akrual, sampai menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, dikarenakan penggunaan standar akuntansi yang berbeda itulah maka laporan keuangan belum bisa dibandingkan. (Agung Bakti Sarana, KoranSINDO, 2017). Terakhir, belum dapat dipahami oleh pengguna informasi keuangan dikarenakan belum sepenuhnya menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang baik sehingga menyebabkan menurunnya kredibilitas laporan keuangan dan kemampuan untuk dipahami oleh pengguna. (BPK,2018).

Berpengaruhnya penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah telah di uji oleh oleh para peneliti sebelumnya. Para peneliti terdahulu mengkombinasikan berbagai model teori dengan menggunakan berbagai variabel dan pada unit analisa yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Salomi pada 82 pemerintah daerah di Kota Ambon ditahun 2015 hasilnya menunjukan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi serta akuntabilitas keuangan.

Penelitian Maria Magdalena (2016) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jember berhasil membuktikan ⁶Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah,

dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berarti bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, serta semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Kemudian penelitian yang dilakukan Nurlaili di tahun 2016 pada SKPD di kota Bengkalis membuktikan bahwa Penyajian dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian pula Hasil Penelitian Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani pada SKPD di Pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2017, melalui uji analisis regresi ¹¹ber ganda berhasil membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi model ³ori yang diusulkan yaitu pengaruh pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan konsep, permasalahan /fenomena serta hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian kembali untuk mengembangkan model konsep teori yang telah ada sebelumnya dengan judul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Bandung.”

METODE

Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan penelitian terkait besaran pengaruh antar variabel yang telah dinyatakan sebelumnya dalam pendahuluan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Nilai score
Pengendalian Internal (X1)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Informasi dan Komunikasi 4. Aktivitas pengendalian 5. Pemantauan
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
Akuntabilitas Keuangan Y	1. Integritas Keuangan 2. Pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4 Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa jawaban responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disebarakan pada Satuan Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai unit analisis dan bagian keuangan serta bagian pengendalian sebagai unit observasi.

Data penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji Reliabilitas. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 25 menunjukkan koefisien realibilitas masing-masing variabel berada pada angka > 0,60, maka disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan sudah reliabel dan jawaban yang telah diberikan oleh responden dengan pernyataan dapat dipercaya

5 Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah 80 bagian keuangan dan bagian pengendalian internal yang tergabung dalam SKPD Kota Bandung. Penentuan Jumlah sampel minimum yang digunakan ditentukan dengan menggunakan *rule of thumb* yaitu, 10 kali jumlah terbanyak dari indikator formatif variabel pengendalian internal yang terdiri dari 5 indikator formatif sehingga jumlah sampel minimum dalam penelitian ini berjumlah 50 responden.

Model teori dalam penelitian ini diuji menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan penaksiran *Partial Least Square* (PLS). Hipotesis penelitian di uji dengan menggunakan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil Analisis Deskriptif⁴ menggambarkan tanggapan responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, dan akuntabilitas keuangan yang dapat dilihat pada tabel 1, dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Score Variabel Penelitian

Variabel dan Indikator	Score		
	Actual	Ideal	%
Lingkungan Pengendalian	182	285	64%
Penilaian Risiko	194	285	68%
Informasi dan Komunikasi	189	285	66%
Aktivitas pengendalian	185	285	65%
Pemantauan	184	285	65%
Pengendalian Internal (X₁)	710	1140	62%
Relevan	187	285	66%
Andal	187	285	66%
Dapat dibandingkan	148	285	52%
Dapat Dipahami	188	285	66%
Kualitas Laporan Keuangan (X₂)	710	1140	62%
Integritas Keuangan	193	285	67%
Pengungkapan	184	285	64%
Kepatuhan thd peraturan perundang-undangan	189	285	66%
Akuntabilitas Keuangan (Y)	565	855	65%

Sumber: hasil spss.

Mengacu pada informasi yang disajikan pada tabel 1, menggambarkan bahwa rata-rata persentase tanggapan untuk variabel Kualitas Laporan

Keuangan⁹ sebesar 62%, termasuk kriteria Cukup karena berada pada interval 52,01%-68,00% dan memiliki gap sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Bandung belum mencapai tingkat ideal atau belum optimal.

Selanjutnya pada tabel 1, diketahui rata-rata persentase tanggapan responden untuk variabel Pengendalian Internal sebesar 66%, skor tersebut termasuk kedalam kategori Cukup karena berada pada interval 52,01%-68,00%. Skor tersebut tidak mencapai 100% sehingga memiliki gap sebesar 34% sehingga menunjukan Pengendalian Internal di SKPD di Kota Bandung masih belum mencapai tingkat ideal, dan yang menjadi kekurangan di variabel ini menurut penelitian adalah pada indikator komunikasi dan informasi.

Pada tabel 1, terlihat rata-rata persentase tanggapan untuk variabel Akuntabilitas Keuangan⁶ sebesar 65%, angka tersebut termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01% - 68,00% dan terdapat gap sebesar 35% dari 100%. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas keuangan daerah di SKPD Kota Bandung belum baik pertanggungjawabannya.

Hasil Analisis Verifikatif.

Analisis verifikatif menyajikan hasil pengujian Data dengan menggunakan

software PLS dengan tahapan sebagai berikut: Pengujian Convergent validity, Discriminant validity, Composite reliability, Goodness of Fit, dan Hipotesis penelitian. Hasil Uji convergent Validity dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil perhitungan Loading Faktor

Indikator/Variabel Manifest	Loading Factor	KET
Relevan	0.967	Valid
Andal	0.970	Valid
Dapat Dibandingkan	0.851	Valid
Dapat Dipahami	0.950	Valid
Lingkungan Pengendalian	0.978	Valid
Penilaian Resiko	0.981	Valid
Informasi dan Komunikasi	0.953	Valid
Aktivitas Pengendalian	0.946	Valid
Pemantauan	0.959	Valid
Integritas Keuangan	0.969	Valid
Pengungkapan	0.930	Valid
Ketaatan thd aturan undang2	0.967	Valid

Sumber: Output Software PLS

Berdasarkan tabel 2, diketahui nilai dari *outer loading* setiap indikator memiliki nilai $\geq 0,6$ artinya adalah setiap indikator dari variabel Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas Keuangan memiliki telah valid mengukur variabelnya masing-masing.

Selanjutnya pada tabel 3, diperlihatkan hasil Pengujian Discriminant Validity dengan melihat hasil cross loading factornya, hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Cross loading Factor

	Kualitas Laporan Keuangan (X1)	Pengendalian Internal (X2)	Akuntabilitas Keuangan (Y)
X1.1	0.823	0.967	0.843
X1.2	0.836	0.970	0.808
X1.3	0.772	0.851	0.777
X1.4	0.818	0.950	0.760
X2.1	0.77	0.813	0.978
X2.2	0.785	0.825	0.981
X2.3	0.809	0.817	0.953
X2.4	0.793	0.824	0.946
X2.5	0.819	0.822	0.959
Y1	0.696	0.868	0.794
Y2	0.930	0.926	0.029
Y3	0.967	0.967	0.010

Sumber: Output Software PLS

Berdasarkan tabel 3 dapat dianalisa bahwa hampir seluruh konstruk laten untuk indikator bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan nilai *composite reliability* pada setiap variabel laten di tabel 6 memiliki nilai $\geq 0,7$ yang artinya mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi. Pengujian selanjutnya adalah pengujian kecocokan model atau *Goodness of Fit* (GoF). Pengujian ini bertujuan untuk menguji kecocokan model yang diusulkan oleh peneliti. Nilai GoF pada penelitian ini adalah sebesar 0,845 yang menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat diterima.

Untuk melihat besaran pengaruh antar variabel dapat dilihat dari nilai *R-square* dalam tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4. Score Koefisien jalur

	Koefisien Jalur Struktural	Pengaruh (%)	T statistik
Kualitas Laporan Keuangan (X ₁) → Akuntabilitas Keuangan (Y)	0.602	52.31%	4,140
Pengendalian Internal (X ₂) → Akuntabilitas Keuangan (Y)	0.314	25.94%	2,146
Total Pengaruh (R²)			
78.25%			

Sumber: Output Software PLS.

- Nilai *R-square* yang diperoleh variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) sebesar 78,25%. Hal ini berarti bahwa 78,25% variabel Akuntabilitas Keuangan dipengaruhi oleh variabel Kualitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal.
- Besaran Pengaruh Antara variabel Kualitas Laporan Keuangan dengan variabel Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,602 pada t_{kritis} sebesar 2,002. Nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,140 lebih besar dari t_{kritis} yang berarti Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan.
- Besaran Pengaruh Antara variabel Pengendalian Internal dengan variabel Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,314 dengan t_{kritis} sebesar 2,002. Nilai $t_{statistik}$ sebesar 2,146 lebih besar dari t_{kritis} , yang berarti

Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Pembahasan Hasil Penelitian.

Penelitian ini mengusulkan model konseptual sebagai berikut: Akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh Kualitas penyajian laporan keuangan dan Efektifitas Pengendalian Internal.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan software PLS Diketahui bahwa model konseptual yang diusulkan oleh peneliti dapat diterima berdasarkan hal-hal berikut ini: 1). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas penyajian laporan keuangan, Pengendalian internal dan Akuntabilitas keuangan telah dinyatakan Valid (tepat) dalam mengukur variabel tersebut, 2). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dinyatakan konsisten (handal) dalam mengukur variabel tersebut, serta 3). Model konseptual yang diusulkan yang diusulkan oleh peneliti dapat diterima berdasarkan nilai Goodness of Fit. Model Penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin berkualitasnya penyajian laporan keuangan serta semakin efektifnya pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

10
Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil pengujian korelasi juga menunjukkan Kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah dengan akuntabilitas keuangan (nilai korelasi sebesar 0,869). Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah sebesar 52,31% dan termasuk dalam pengaruh yang dominan. Hasil pengujian statistik dapat diinterpretasikan bahwa semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

Adapun adanya kesenjangan/Gap yang dihasilkan sebesar 47,69% merupakan besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel lain selain variabel Penyajian laporan keuangan yang berkualitas, seperti variabel pengendalian internal ataupun variabel aksebilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah maupun variabel transparansi publik yang tidak diteliti oleh penulis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Salomi pada tahun 2015 pada pemerintahan di Kota Ambon, Maria

Magdalena tahun 2016 di SKPD Kota Jember, Nurlaili di tahun 2016 pada SKPD di kota Bengkalis serta Miftahul Reza Fauziah dan Nur Handayani pada SKPD di Pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2017 bahwa penyajian Laporan Keuangan yang baik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris Akuntabilitas Keuangan dipengaruhi oleh kualitas penyajian laporan keuangan masih tetap berlaku dan dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengembangkan model teoritis selanjutnya hingga saat ini.

Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil pengujian Hipotesis membuktikan Akuntabilitas Keuangan dipengaruhi oleh Efektifitas Pengendalian Internal dengan nilai korelasi sangat kuat sebesar 0,826. Besaran pengaruh efektifitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung adalah 25,94% menunjukkan pengaruh yang kurang dominan memunculkan kesenjangan/GAP sebesar 74,06%. Gap tersebut menunjukkan bahwa 73,06% Akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh kualitas penyajian laporan keuangan serta faktor

8 pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan faktor lain yang tidak diteliti saat ini.

Penelitian ini berhasil membuktikan model teori yang diusulkan serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dolly Ramon pada 64 responden Inspektorat Kota Sumatera Barat, penelitian Heppy dan Andy di tahun 2017 pada 106 pemerintah daerah di pulau Jawa serta hasil Penelitian Karyadi (2019) pada 216 Perangkat Desa kecamatan Aikmel dan Lenek bahwa Pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh Kualitas penyajian laporan keuangan, yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Permasalahan akuntabilitas keuangan yang rendah pada pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia terjadi karena penyajian laporan keuangan tidak berkualitas, karena laporan keuangan yang belum relevan, belum andal, belum bisa dibandingkan, dan belum bisa dipahami secara baik oleh para pengguna laporan keuangan sehingga mempengaruhi

akuntabilitas keuangan daerah yang dihasilkan.

2. Akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh faktor Efektifitas Pengendalian internal. Permasalahan akuntabilitas keuangan yang rendah dapat terjadi karena pemerintah pusat dan daerah belum melaksanakan pengendalian internal secara efektif.

Saran Operasional

1. Kualitas penyajian laporan keuangan merupakan variabel yang terbukti secara dominan mempengaruhi akuntabilitas keuangan, oleh karenanya Pegawai keuangan SKPD Kota Bandung disarankan untuk lebih memperhatikan setiap detail pelaporan, selalu melampirkan dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan dengan lengkap dan bersikap jujur sehingga keberadaannya bisa diverifikasi dengan baik, mampu melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah dengan konsisten agar bisa dibandingkan sehingga informasi keuangan yang disajikan mudah dipahami. Hal ini akan memudahkan pada saat pengecekan dana publik yang diberikan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
2. Untuk memperbaiki masalah dalam pengendalian internal, sebaiknya para pegawai bisa memulai membuat

lingkungan pengendalian yang baik dengan lebih disiplin dalam melaksanakan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh manajemen dan selalu menindaklanjuti hasil evaluasi atau revidi yang diberikan oleh BPK dengan baik, sehingga bisa terkontrol jalannya aktivitas pengendalian suatu elemen dalam instansi dan bisa terkomunikasikan dengan baik setiap detail informasi yang disampaikan. Karena jika semakin baik pengendalian internal akan semakin baik pula akuntabilitas keuangan yang dihasilkan.

Saran Akademis

1. Bagi perkembangan ilmu akuntansi Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi pembelajaran untuk membantu mengembangkan dan menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.
2. Bagi peneliti lain Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel pengendalian internal, tetapi variabel lain yang dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap akuntabilitas keuangan dan juga

memperbanyak teori pendukung yang digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- A'ing, A. (2015). Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Badan Pemeriksa Keuangan. Mei 2018. <http://bandung.bpk.go.id/?p=12313>, 20 Desember 2018
- Bakti, Agung. 2017. *KoranSINDO*. Diakses pada April 2019
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- BPK, LHP LKPD, <http://bandung.bpk.go.id/?cat=72>
- Charli. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun*. Vol.2.2
- Dolly Ramon. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, No.2
- Fauziyah, Miftahul Reza dan Nur Handayani. 2017. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi*, Vol.6, No 6. STISEA Surabaya.

- Heppy dan Andy. 2017. *Pengaruh Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Hery. 2016. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo
- Ichlas, Muhammad, Hasan Basri dan Muhammad Arfan. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Indah, Nur, Fatmawati. 2018. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/3982446/korupsi-rth-pemkot-bandung-rugikan-negara-rp-26-m>. Diakses pada 18 Mei 2019
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Karyadi, Muh. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitaskeuangan Desa. *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani* Vol. 7 No.2 Tahun 2019.
- Magdalena, Maria. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*.
- M. Mahsun, dkk. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Ni Made, Nyoman Trisna, Nyoman Ari. 2014. *Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik*. Vol.2.1
- Nordiawan, Dedi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurlaili. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksebillitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*. Vol.3 No.1 (Februari) 449-461.
- Purba, Br. Rahima. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparasi Publik dan Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Tanah Datar*. Vol.8.1;99-111, ISSN: 2087-4669
- Ririh dan Lilis. 2017. *Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Semarang*. Vol. 24.1;94
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13, alihbahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Jakarta: Salemba Empat
- Salomi, J.H. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.



JURNAL AGREGASI

Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam
Demokrasi
Volume 9-Nomor 1, Mei 2021



DOI: 10.34010/agregasi.v9i1.4372

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

-
- Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM). Vol.2.1;82-90. ISSN: 2320-9791.*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance,* Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sujarweni, Wiranata, V. 2017. *Analisis Laporan Keuangan - Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit UMMah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *Pemerintahan Integratif*, 3(4), 545-559. Retrieved from <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/33>
- tinggi (PPMUPT) bekerja sama dengan Kemendikbud- Dikti.

Profile Penulis :

DR. Lilis Puspitawati, SE.,M.Si Ak.CA, Lektor Kepala/ IV-B. Dosen Tetap Prodi Akuntansi FEB UNIKOM. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIKOM Bandung. Aktif Melakukan penelitian, menulis beberapa artikel pada beberapa jurnal terindeks sinta dan Scopus, menulis buku Sistem informasi Akuntansi serta aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui Program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pollux-fid.de Internet Source	5%
2	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.unived.ac.id Internet Source	3%
4	Diana Santika Dewi, Endah Susilowati. "Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2022 Publication	1%
5	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
7	journal.unj.ac.id Internet Source	1%

8

repositories.usu.ac.id

Internet Source

1 %

9

Jatmiko Wahyudi. "Penerimaan Pemerintah Desa Terhadap Penerapan Aplikasi Penanganan Bencana Berbasis Android (SIDINA) di Kabupaten Pati", Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 2022

Publication

1 %

10

journal.ikopin.ac.id

Internet Source

1 %

11

repository.stienobel-indonesia.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On